

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Profil Perusahaan

Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau lebih dikenal dengan sebutan Pelindo 3 merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam jasa layanan operator terminal pelabuhan. Perusahaan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Peraturan tersebut ditandatangani oleh Presiden Ke-2 Republik Indonesia Soeharto pada tanggal 19 Oktober 1991. Selanjutnya, pembentukan Pelindo 3 dituangkan dalam Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., Nomor : 5, tanggal 1 Desember 1992 sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan hingga perubahan terakhir dalam Akta Notaris Yatiningsih, S.H, M.H., Nomor: 72, tanggal 10 Juli 2015.

Sebagai operator terminal pelabuhan, Pelindo 3 mengelola 43 pelabuhan dengan 16 kantor cabang yang tersebar di tujuh propinsi di Indonesia meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keberadaan Pelindo 3 tak lepas dari wilayah Indonesia yang terbentuk atas jajaran pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Sebagai jembatan penghubung antar pulau maupun antar negara, peranan pelabuhan sangat penting dalam keberlangsungan dan kelancaran arus distribusi logistik. Pelayanan terbaik dan maksimal merupakan komitmen Pelindo 3 untuk menjaga kelancaran arus logistik nasional. Komitmen itu

tertuang dalam visi perusahaan Berkomitmen Memacu Integrasi Logistik dengan Layanan Jasa Pelabuhan yang Prima. Mendukung visi tersebut, Pelindo 3 menetapkan strategi-strategi yang dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang dievaluasi setiap 4 (empat) tahun sekali.

Pelindo 3 memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan. Oleh karenanya, setiap tindakan yang diambil oleh perusahaan selalu mengacu pada tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Perusahaan juga menerbitkan pedoman etika dan perilaku (Code of Conduct) sebagai acuan bagi seluruh insan Pelindo 3 mulai dari Komisaris, Direksi, hingga Pegawai untuk beretika dan berperilaku dalam proses bisnis serta berperilaku dengan pihak eksternal. Perangkat lain yang mendukung Pelindo 3 dalam meraih visi dan misi perusahaan adalah penghayatan nilai-nilai Budaya Perusahaan. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, mengutamakan kepuasan pelanggan adalah menjadi prioritas. Customer Focus menjadi budaya perusahaan yang pertama harus tertanam dalam diri setiap insan Pelindo 3, dilanjutkan oleh Care dan budaya perusahaan yang ketiga adalah Integrity.

Kini, Pelindo 3 menjadi salah satu BUMN besar di Indonesia dengan tingkat jumlah aset yang meningkat setiap tahunnya. Pelindo 3 juga menjadi segelintir BUMN yang memasuki pasar global. Hal ini membuktikan bahwa Pelindo 3 memiliki daya saing yang tinggi dan menjadi perusahaan berkelas internasional.

Pelabuhan Indonesia 3 dalam menjalankan perusahaannya memiliki berbagai divisi untuk mencapai visi yang telah disepakati. Dimana divisi tersebut terbagi menjadi empat divisi, diantaranya yaitu;

1. *Commercial & Operation Director*
2. *Engineering & ICT Director*
3. *Human Capital & General Affair Director*
4. *Finance Director*

Sedangkan untuk *Engineering & ICT Director* terbagi atas beberapa subdit divisi;

- a. *Port Equipment*
- b. *Port Facility*
- c. *Port Engineering Supervision*
- d. *Information and Communication Technology*

Untuk *Information and Communication Technology*, juga kembali dibagi atas dua bagian diantaranya bagian software, dan bagian IT support. Sedangkan bagian software kembali terbagi diantaranya IT Governance, Programming, Implementasi, Database. (Pelabuhan Indonesia III, 2018)

2.2 IT Governance

IT governance merupakan usaha mensinergikan peran IT dan governance dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi. IT fokus kepada teknologi sementara governance fokus kepada tata kelola. Karenanya definisi governance pada tatanan IT governance adalah sebagai suatu kumpulan manajemen, perencanaan dan laporan kinerja, dan tinjauan proses-proses yang berhubungan dengan keputusan yang benar dan tepat, menetapkan kontrol, dan pengukuran kinerja diatas kunci penanam modal, pelayanan operasional, pengiriman dan meng-otorisasi perubahan peluang baru atau pemenuhannya sesuai peraturan, hukum dan kebijakan-kebijakan. Tata kelola menyusun, membentuk dan menjelaskan kekeliruan atau kesalahan, pertanggung jawaban dan keputusan yang tepat. IT governance adalah suatu bagian utuh dari tata kelola perusahaan dan terdiri dari pimpinan dan struktur organisasi dan proses-proses yang menjamin keberlanjutan IT organisasi mengembangkan dan memperluas strategi dan tujuan organisasi. Dengan demikian IT governance dapat didefinisikan sebagai “keputusan yang benar dan dalam bingkai yang bisa di minta pertanggung-jawaban untuk mendorong keinginan dan kebiasaan

penggunaan teknologi informasi”. IT governance dapat juga dipahami sebagai landasan kerja yang mengukur dan memutuskan teknologi informasi dengan mempertimbangkan maksud, tujuan, dan sasaran bisnis perusahaan. Definisi tersebut sejalan dengan elemen pokok IT governance yang terdiri dari:

1. Manajemen kinerja (Performance Management)
2. Manajemen Resiko (Risk Management)
3. Manajemen Investasi (Investment Management)
4. Penjajaran Bisnis (Business Alignment)

IT Governance pada perusahaan PT. PELINDO III Surabaya berfokus pada semua lingkup IT yang ada di perusahaan ini, dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proyek yang sedang di rencanakan atau dilaksanakan, service management dengan melakukan implementasi hasil dari proyek yang sudah selesai dilaksanakan. (Surendro, 2009)

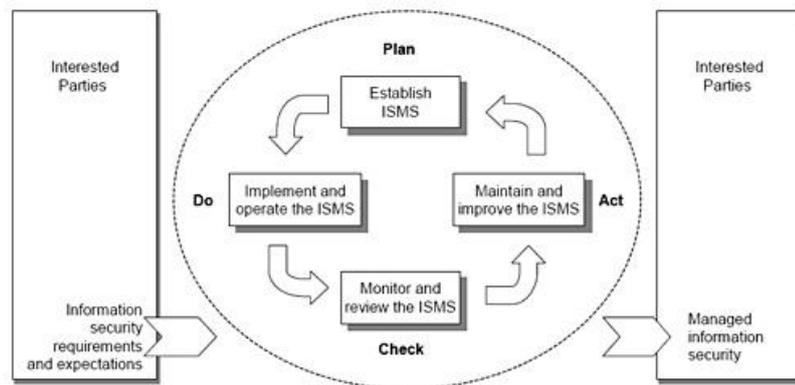
2.3 ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 dirilis pada tahun 2005. ISO/IEC 27001 ini terus mengalami pembaharuan. Standar ini dibuat sebagai model untuk penetapan, penerapan, pengoperasian, pemantauan, pengkajian, pemeliharaan dan perbaikan ISMS. ISO/IEC 27001 memberikan gambaran umum mengenai kebutuhan yang dibutuhkan perusahaan/organisasi dalam usahanya untuk mengimplementasikan konsep-konsep keamanan informasi. Penerapan ISO/IEC 27001 disesuaikan dengan tujuan, sasaran dan kebutuhan organisasi. Pendekatan proses ini menekankan pada beberapa hal sebagai berikut :

1. pemahaman persyaratan keamanan informasi organisasi dan kebutuhan terhadap kebijakan serta sasaran keamanan informasi,
2. penerapan dan pengoperasian kontrol untuk mengelola resiko keamanan informasi dalam bentuk konteks resiko bisnis organisasi secara keseluruhan,
3. pemantauan dan tinjau ulang kinerja dan efektivitas ISMS, dan

4. peningkatan berkelanjutan berdasarkan pada pengukuran tingkat ketercapaian sasaran

Standar ini mengadopsi model "Plan-Do-Check-Act" (PDCA), untuk membentuk seluruh proses ISMS. Standar ini memberikan model yang kokoh untuk menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam panduan tersebut yang mengatur asesmen resiko, desain keamanan dan penerapan, manajemen keamanan dan reassesmen



Gambar 2. 1 Model PCDA (27001)

Berikut ini merupakan penjelasan dari model PCDA:

1. Plan (Establish ISMS)

Pada tahapan ini dilakukan dengan menetapkan kebijakan ISMS, sasaran, proses dan prosedur yang relevan untuk mengelola resiko dan meningkatkan keamanan informasi agar memberikan hasil sesuai dengan kebijakan dan sasaran.

2. Do (Maintain and improve the ISMS)

Tahapan ini dilakukan dengan menetapkan cara pengoperasian kebijakan ISMS, kontrol, proses dan prosedur-prosedur.

3. Check (Monitor dan review the ISMS)

Tahapan ini dilakukan dengan mengkaji dan mengukur kinerja proses terhadap kebijakan, sasaran, praktek-praktek dalam menjalankan ISMS dan melaporkan hasilnya untuk penilaian efektivitasnya.

4. Act (Implement and operate the ISMS)

Tahapan ini dilakukan dengan melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan berdasarkan hasil evaluasi, audit internal dan tinjauan manajemen tentang ISMS atau kegiatan pemantauan lainnya untuk mencapai peningkatan yang berkelanjutan.

Standar ini juga menjelaskan beberapa syarat utama yang harus dipenuhi, antara lain:

- Sistem manajemen keamanan informasi (kerangka kerja proses dan dokumentasi)
- Tanggung jawab manajemen
- Audit internal ISMS
- Peninjauan ulang terhadap manajemen ISMS
- Peningkatan berkelanjutan

(Chazar, 2015)

2.4 Security Awareness

Security awareness merupakan suatu kesadaran yang dimiliki dari seseorang atau kelompok diikuti dengan tindakan untuk melindungi diri dan asset, terutama data atau informasi yang dimiliki dari berbagai macam ancaman, serangan, atau peristiwa yang merusak atau merugikan secara fisik maupun non-fisik. Security awareness berarti mengerti tentang:

1. Keamanan sistem informasi dan level keamanan sistem informasi
2. Pentingnya keamanan sistem dan konsekuensi atas kelemahan-kelemahan keamanan sistem.
3. Tanggung jawab masing-masing individu atas keamanan sistem informasi dan tindakan untuk mengamankan sistem informasi.

Mencari tahu tentang pentingnya keamanan komputer dan informasi yang kita miliki juga merupakan salah satu bentuk kewaspadaan yang harus dikembangkan. (F Ngantung, 2015)

2.5 Project Time Management

Menurut Schwalbe (2004, pp183-184), Manajemen waktu proyek secara sederhana didefinisikan yaitu melibatkan proses yang dibutuhkan untuk menyakinkan pemenuhan waktu dari proyek. Tetapi pencapaian hasil ini tidak sederhana.

Proses utama yang terlibat didalam manajemen waktu proyek adalah :

1. Pendefinisian Aktivitas (Activity Definition)

Melibatkan pengidentifikasian aktifitas yang khusus dimana anggota tim proyek dan pemegang saham harus berkerja untuk menghasilkan pengarahannya proyek. Sebuah aktifitas atau tugas adalah elemen kerja, biasanya ditemukan didalam Work Breakdown Structure (WBS) yang mempunyai durasi yang diharapkan, biaya, dan kebutuhan akan sumber daya.

2. Barisan Aktivitas (Activity Sequencing)

Melibatkan pengidentifikasian dan pendokumentasian hubungan antara aktivitas proyek.

3. Perkiraan Durasi Aktivitas (Activity Duration Esting)

Melibatkan perkiraan periode jumlah kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktifitas individu.

4. Pengembangan jadwal (Schedule Development)

Melibatkan analisa urutan aktifitas, perkiraan durasi aktifitas, dan kebutuhan sumber daya untuk menciptakan jadwal proyek.

- a. Gantt Chart

Menurut Schwalbe (2004, p192), Gantt Chart menyediakan suatu format standard untuk menggambarkan informasi mengenai jadwal proyek dengan menampilkan kegiatan proyek, jadwal mulai dan jadwal selesai dalam format kalender.

b. Critical Path Method (CPM)

Menurut Schwalbe (2004, p196), Critical Path Method (CPM) juga disebut Critical Path Analysis adalah suatu teknik analisa jaringan proyek yang digunakan untuk meramalkan total jangka waktu proyek. Alat yang penting ini digunakan dalam memprediksi total waktu proyek. Suatu Critical Path untuk suatu proyek adalah rangkaian aktivitas dari awal proyek dikerjakan sampai proyek tersebut diselesaikan. Menggunakan network diagram dan mempunyai sedikit slack atau float adalah waktu dari aktivitas yang mungkin tertunda tanpa menunda suatu aktivitas atau tanggal penyelesaian proyek.

c. Critical Chain Scheduling

Menurut Schwalbe (2004, p202), Critical Chain Scheduling adalah suatu metode penjadwalan yang mempertimbangkan sumber daya yang terbatas ketika menciptakan jadwal proyek dan memasukkan buffer pada proyek.

Bufer adalah penambahan waktu untuk melengkapi tugas, penambahan pada perkiraan untuk nilai dari bermacam-macam faktor. Buffer dibagi menjadi 2, antara lain :

1. Feeding Buffer : penambahan waktu yang ditambahkan sebelum tugas pada bagian kritis didahului oleh bagian tugas yang non-kritis.
2. Project Buffer : penambahan waktu yang ditambahkan sebelum tanggal proyek selesai

5. Program Evaluation and Review Technique (PERT)

Tehnik analisis jaringan yang biasa digunakan untuk menghitung durasi suatu proyek dengan memperhitungkan faktorfaktor ketidakpastian dari suatu individu-individunya. PERT analisis

PERT Weighted average formula :

$$\frac{\text{optimistic time} + 4 \times \text{most likely time} + \text{pessimic time}}{6}$$

mengaplikasikan metode jalur kritis dan memberikan rata-rata estimasi durasi.

6. Pengontrolan Jadwal (Schedule Control)

Melibatkan pengontrolan dan pengaturan perubahan terhadap perubahan jadwal. (Listiawan, 2014)